



PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847):

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD.
8. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja.
14. Reses adalah kegiatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD di luar masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
15. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
16. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
17. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

BAB II PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, berupa:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan, berupa:
 - a. TKI; dan
 - b. tunjangan reses.

Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepada Pimpinan DPRD diberikan DOP DPRD.

Bagian Kedua Uang Representas Pasal 4

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 4

- (1) Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sebagai berikut :
 - a) Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b) Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c) Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga
Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per anak;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) per anak; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) per anak;
- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Bagian Keempat
Tunjangan Beras
Pasal 6

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Uang Paket
Pasal 7

- (1) Uang paket bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 - a. ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan
Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 - a. ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain
Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya, yaitu:
 - a. ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - b. wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - c. sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; dan
 - d. anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
 - a. Ketua sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan

TKI

Pasal 10

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kelompok Kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar perkalian dalam menghitung besaran TKI ditentukan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga diperoleh paling banyak Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga diperoleh paling banyak Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; atau
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) Kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga diperoleh paling banyak Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Tunjangan Reses

Pasal 11

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a;
- (3) Standar perkalian dalam menghitung besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga diperoleh paling banyak Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap kali melaksanakan reses;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga diperoleh paling banyak Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali melaksanakan reses; atau
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga diperoleh paling banyak Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap kali melaksanakan reses;
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyediakan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajiban sesuai dengan kebutuhan nyata.
- (5) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati mengenai penetapan kelompok kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan yang terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;

- c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD.
 - (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kesebelas Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan dilaksanakan di rumah sakit umum Daerah/rumah sakit umum pusat di Daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

Bagian Keduabelas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Rumah Negara dan Perlengkapan bagi Pimpinan DPRD
Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Bagian Kelimabelas
Belanja Rumah Tangga Bagi Pimpinan DPRD
Pasal 17

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi kebutuhan minimal rumah tangga Bupati.
- (5) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja bahan pakai habis;
 - b. belanja alat listrik dan elektronik;
 - c. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - d. belanja pengisian tabung gas;
 - e. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - f. belanja makanan dan minuman tamu; dan/atau
 - g. belanja makanan dan minuman rumah jabatan.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), kepada yang bersangkutan tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Keenambelas
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf g dan ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 19

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD sebesar Rp15.648.252,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) per bulan; dan
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp10.835.679,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) per bulan.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi.

Bagian Ketujuhbelas
Kendaraan Dinas Bagi Pimpinan DPRD

Pasal 20

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (4) Tata cara pengembalian kendaraan dinas dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

- dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas
Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 21

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada:
- a. Pimpinan DPRD, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
 - b. Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
- a. wakil ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
 - b. anggota DPRD sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

BAB III
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi, yaitu Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); Wakil Ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, sebesar 2 (dua) bulan uang representasi, yaitu Ketua DPRD sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); Wakil Ketua DPRD sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan Anggota DPRD sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi, yaitu Ketua DPRD sebesar

- Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); Wakil Ketua DPRD sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan Anggota DPRD sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, yaitu Ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); Wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan Anggota DPRD sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 5 (lima) bulan uang representasi, yaitu Ketua DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); Wakil Ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan Anggota DPRD sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak dibayarkan uang jasa pengabdian.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 23

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa:
- a. program yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. DOP DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya kontribusi dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 diberikan sesuai standar biaya umum yang berlaku di Daerah.

Pasal 24

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan

- kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
- (2) DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) DOP DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan serta penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.
 - (4) Penganggaran DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, berdasarkan kelompok kemampuan keuangan Daerah;
 1. tinggi, 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga diperoleh Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 2. sedang, 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga diperoleh Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; atau
 3. rendah, 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD sehingga menjadi Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, berdasarkan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sehingga diperoleh Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 2. sedang, 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sehingga diperoleh Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 3. rendah, 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sehingga menjadi Rp2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - (5) Besaran DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diberikan setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *Lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah.
- (4) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. daftar penerima DOP DPRD; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DOP DPRD berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 27

- (1) Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran DOP DPRD yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran mengelola DOP DPRD untuk dukungan dana operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DOP DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DOP DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DOP DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sisa DOP DPRD tersebut menjadi tambahan DOP DPRD bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengajuan DOP DPRD bulan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang per hari atau orang per bulan.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan strata 1 (satu) sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. berpendidikan strata 2 (dua) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan strata 1 (satu) sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. berpendidikan strata 2 (dua) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Belanja sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makanan dan minuman rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan kapatutan.

BAB V

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 32

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan hak administratif berupa:

- a. uang representasi;
- b. uang paket;
- c. tunjangan keluarga;
- d. tunjangan beras;

- e. jaminan kesehatan; dan
- f. jaminan kematian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang telah dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dinyatakan tetap sah dan pembayaran selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 September 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR : 19